



STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN

DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59
TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

LAPORAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



1. Pelayanan kesehatan ibu hamil



4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir



7. Pelayanan kesehatan balita



10. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



2. Pelayanan kesehatan pada usia produktif



5. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut



8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi



11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus



3. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat



6. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis



9. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV



KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini tersusun atas Kerjasama tim di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih banyak.

Painan, 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP.19701104 200002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum	2
D. Arah Kebijakan	3
BAB II PENERAPAN SPM.....	7
A. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	4
BAB III PENCAPAIAN SPM.....	7
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	7
2. Target Pencapaian SPM Daerah	12
3. Anggaran.....	16
4. Dukungan Personil.....	17
5. Hasil Capaian.....	20
6. Permasalahan dan Solusi	21
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	26
BAB V PENUTUP.....	27
A. Simpulan	27
B. Saran	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstural memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan napa yang secara normative dijamin dan konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kegidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai pelayanan public secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public, dengan program penyempurnaan sistim manajemen pelayanan public dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan control terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public salah satunya bidang Kesehatan.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menyusun rencana Pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.1

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal					
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggungjawab
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	679	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)		956		
	2 Tablet Tambah Darah		860400		
	3 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil		9560		
	*Tes Kehamilan				
	*Pemeriksaan HB				
	*Pemeriksaan Golongan Darah				
	*Pemeriksaan Glukoprotein Urin				
	4 Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu		9560		
	5 Buku KIA		9560		
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	648	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Formulir Photograf		9128		
	2 Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		9560		
	3 Buku KIA		9560		
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	618	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Vaksin Hepatitis B0		8691		
	2 Vitamin K1 Injeksi		8691		
	3 Salep/Tetes Mata Antibiotik		8691		
	4 Formulir Bayi Baru Lahir		8691		
	5 Formulir MTBM		26073		
	6 Buku KIA		9560		
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3036	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		42708		
	2 Formulir DDTK		42708		
	3 Buku KIA		9560		
	4 Vitamin A Biru		17382		
	5 Vitamin A Merah		69026		
	6 Vaksin Imunisasi Dasar:		42708		
	*HB0				
	*BCG				
	*Polio				
	*IPV				
	*DPT-HB-Hib				
	*Campak Rubella				
	7 Vaksin Imunisasi Kanjutan:		42708		
	*DPT-HB-Hib				
	*Campak Rubella				
	8 Jarum Suntik dan BHP		42708		
	9 Peralatan Anafilaktik		21		

V	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6198	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Buku Raport Kesehatanaku		81280		
	2 Buku Pemantauan Kesehatan		81280		
	3 Kuesioner Skrining Kesehatan		81280		
	4 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		81280		
	5 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		81280		
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	241811	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Pedoman dan Media KIE		292943		
	*Alat Ukur Berat Badan				
	*Alat Ukur Tinggi Badan				
	*Alat Ukur Lingkar Perut				
	*Tensimeter				
	*Glukometer				
	*Tes Strip Gula Darah				
	*Lancet				
	*Kapas Alkohol				
	*KIT IVA Test				
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		20		
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	4875	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Strip Uji Pemeriksaan		68574		
	*Gula Darah				
	*Kolesterol				
	2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		49994		
	3 Buku Kesehatan Lansia		49994		
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	82305	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		42		
	2 Tensimeter		228		
	3 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi PTM		20		
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	2058	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 *Glukometer		2058		
	*Strip Tes Gula Darah				
	*Kapas Alkohol				
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi PTM		2058		
	3 Pedoman dan Media KIE		42		

X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Bera (ODGI)	1000	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila sudah tersedia)		21		
	2 Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		21		
	3 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1000		
	4 Media KIE		42		
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga TB yang	5329	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Media KIE (Leaflet, Lembar balik, Poster, Banner)		42		
	2 Reagen Zn TB		7339		
	3 Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		7339		
	4 Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		7339		
	5 Catridge Tes Cepat Molekuler		7339		
	6 Formulir Pencatatan dan Pelaporan		7339		
	7 Pedoman/SOP		7339		
XII	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan risiko terinfeksi HIV		14595	1 Tahun	Dinas Kesehatan
	1 Media KIE Berupa Lembar balik, Leaflet, poster, banner		21		
	2 Tes cepat HIV (RDT) pertama		13542		
	3 bahan medis habis pakai		13542		
	*Hanscoon				
	*Alkohol swab				
	*Plester				
	*Lancet				
	*Jarum spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai				
	* Alat tulis				
	* Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK				

BAB III

PENCAPAIAN SPM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang

diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1
 - d. Pemberian salep mata
 - e. Injeksi HB0
- Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

d. Pelayanan Kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e. IDL
- Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun

- d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
 - e. Pemberian IDL lanjutan
- Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
 - Pemantauan perkembangan balita
 - Pemantauan kapsul Vit A
 - IDL
 - Imunisasi lanjutan
 - Pengukuran BB dan TB
 - Edukasi dan informasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
- Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Standar pelayanan Kesehatan meliputi:
- Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - Pemeriksaan TD
 - Pemeriksaan gula darah
 - Anamnesa perilaku beresiko
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:
- Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - Pengukuran TD
 - Pemeriksaan gula darah
 - Anamnesa perilaku beresiko
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining

Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
- Pengukuran TD
- Pemeriksaan gula darah
- Pemeriksaan gangguan mental
- Pemeriksaan gangguan kognitif
- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- Anamnesa perilaku beresiko

h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagal ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
- Rujukan bila diperlukan

i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- Pengukuran gula darah
- Edukasi
- Terapi farmakologi

j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Pemeriksaan status mental
- b. Wawancara

k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan anamnesia pertama yaitu dari pemeriksaan fisik sampai ke Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh dokter atau perawat poli di Puskesmas atau dirumah sakit

- Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium menggunakan TCM (Tes Cepat Molekuler) atau menggunakan mikroskopis di Puskesmas dan Rumah sakit
- Pemeriksaan klinis menggunakan rontgent/torax dilakukan di rumah sakit

1. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 3.1

Target dan Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah Total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	679	679	0	100
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)		956	956	0	100
	2 Tablet Tambah Darah		860400	860400	0	100
	3 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil		9560	9560	0	100
	*Tes Kehamilan					
	*Pemeriksaan HB					
	*Pemeriksaan Golongan Darah					
	*Pemeriksaan Glukoprotein Urin					
	4 Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu		9560	9560	0	100
	5 Buku KIA		9560	9560	0	100
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	648	648	0	100
	1 Formulir Photograf		9128	9128	0	100
	2 Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		9560	9560	0	100
	3 Buku KIA		9560	9560	0	100
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	618	618	0	100
	1 Vaksin Hepatitis B0		8691	8691	0	100
	2 Vitamin K1 Injeksi		8691	8691	0	100
	3 Salep/Tetes Mata Antibiotik		8691	8691	0	100
	4 Formulir Bayi Baru Lahir		8691	8691	0	100
	5 Formulir MTBM		26073	26073	0	100
	6 Buku KIA		9560	9560	0	100
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3036	3036	0	100
	1 Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		42708	42708	0	100
	2 Formulir DDTK		42708	42708	0	100
	3 Buku KIA		9560	9560	0	100
	4 Vitamin A Biru		17382	17382	0	100
	5 Vitamin A Merah		69026	69026	0	100
	6 Vaksin Imunisasi Dasar:		42708	42708	0	100
	*HB0					
	*BCG					
	*Polio					
	*IPV					
	*DPT-HB-Hib					
	*Campak Rubella					
	7 Vaksin Imunisasi Kanjutan:		42708	42708	0	100
	*DPT-HB-Hib					
	*Campak Rubella					
	8 Jarum Suntik dan BHP		42708	42708	0	100
	9 Peralatan Anafilaktik		21	21	0	100

V	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6198	6198	0	100
	1 Buku Raport Kesehatanaku		81280	81280	0	100
	2 Buku Pemantauan Kesehatan		81280	81280	0	100
	3 Kuesioner Skrining Kesehatan		81280	81280	0	100
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		81280	81280	0	100
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		81280	81280	0	100
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	241811	241811	0	100
	1 Pedoman dan Media KIE		292943	292943	0	100
	*Alat Ukur Berat Badan					
	*Alat Ukur Tinggi Badan					
	*Alat Ukur Lingkar Perut					
	*Tensimeter					
	*Glukometer					
	*Tes Strip Gula Darah					
	*Lancet					
	*Kapas Alkohol					
	*KIT IVA Test					
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		20	20	0	100
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	4875	4875	0	100
	1 Strip Uji Pemeriksaan		68574	68574	0	100
	*Gula Darah					
	*Kolesterol					
	2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		49994	49994	0	100
	3 Buku Kesehatan Lansia		49994	49994	0	100
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	82305	82305	0	100
	1 Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		42	42	0	100
	2 Tensimeter		228	228	0	100
	3 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		20	20	0	100
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	2058	2058	0	100
	1 *Glukometer		2058	2058	0	100
	*Strip Tes Gula Darah					
	*Kapas Alkohol					
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		2058	2058	0	100
	3 Pedoman dan Media KIE		42	42	0	100

X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Bera (ODGJ)	1000	1000	0	100
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila sudah tersedia)		21	21	0	100
2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		21	21	0	100
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1000	1000	0	100
4	Media KIE		42	42	0	100
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga TB yang	5329	5329	0	100
1	Media KIE (Leaflet, Lembar balik, Poster, Banner)		42	42	0	100
2	Reagen Zn TB		7339	7339	0	100
3	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		7339	7339	0	100
4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		7339	7339	0	100
5	Catridge Tes Cepat Molekuler		7339	7339	0	100
6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan		7339	7339	0	100
7	Pedoman/SOP		7339	7339	0	100
XII	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan risiko terinfeksi HIV		14595	14595	0	100
1	Media KIE Berupa Lembar balik. Leaflet, poster, banner		21	21	0	100
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama		13542	13542	0	100
3	bahan medis habis pakai		13542	13542	0	100
	*Hanscoon					
	*Alkohol swab					
	*Plester					
	*Lancet					
	*Jarum spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai					
	* Alat tulis					
	* Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK					

3. Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	874.394.097
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	519.486.334
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	23.450.000
4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	362.909.016
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	465.326.070
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	523.058.702
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	332.335.420
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	49.395.000
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	50.000.000
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	321.223.280
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	38.400.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	20.991.500

4. Dukungan Personil
 - a. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu hamil meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
 2. Bidan, atau
 3. perawat
 - b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu bersalin meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
 2. Bidan, atau
 3. Perawat
 - c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
 2. Bidan
 3. Perawat
 - d. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Balita meliputi:
 1. Tenaga Kesehatan:
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 2. Tenaga non Kesehatan:
 - a. Guru Paud
 - b. Kader kesehatan
 - e. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar meliputi:
 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter gigi
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 2. Tenaga non Kesehatan
 - a. Guru
 - b. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
 - f. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat

- d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
- 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- g. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
 - 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- h. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita hipertensi meliputi:
 - 1. Dokter
 - 2. Bidan
 - 3. Perawat
 - 4. Tenaga Kesehatan masyarakat
- i. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita Diabetes Mellitus meliputi:
 - 1. Dokter
 - 2. Bidan
 - 3. Perawat
 - 4. Tenaga Kesehatan masyarakat
- j. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi:
 - 1. Dokter, atau
 - 2. Perawat terlatih jiwa
 - 3. Tenaga Kesehatan lainnya
- k. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis meliputi:
 - 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru,atau
 - b. Perawat
 - c. Analis Teknik laboratorium medik (ATLM)
 - d. Penata rontgen
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- l. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus + HIV)

1. Tenaga Kesehatan
 - a) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
 - b) Perawat
 - c) Bidan
 - d) ATLM
 - e) Tenaga Kesehatan masyarakat
2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - a) Pendamping
 - b) Penjangkauan

5. Hasil Capaian

Realisasi Target Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	874.394.097	607.426.350	69
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.486.334	210.272.850	40
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.450.000	16.563.900	71
4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	362.909.016	247.633.700	68
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	465.326.070	366.071.350	79
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	523.058.702	325.552.500	62
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	332.335.420	74.201.800	22
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.395.000	41.735.600	84
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	50.000.000	43.695.550	87
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	321.223.280	176.257.699	55
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga TB	38.400.000	37.908.450	99
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	20.991.500	18.428.200	88

6. Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:

- a. Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil di pustu dan poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
- c. Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas yang memiliki USG
- d. Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal
- e. Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan
- b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:

- a. Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu bersalin di pustu dan poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
- c. Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas yang memiliki USG
- d. Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal
- e. Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan
- b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a) Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri
- b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
- c) Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Up date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal
- d) Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:

- a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- b) Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a) Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri
- b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
- c) Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Up date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal
- d) Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:

- a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- b) Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Permasalahan dalam pencapaian pelayanan standar pada anak usia Pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a) Keterbatasan anggaran dalam melakukan screening pada anak usia Pendidikan dasar
- b) Buku rapor Kesehatan tidak memadai untuk seluruh anak sekolah

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- a) Penambahan anggaran untuk kegiatan pelayanan Kesehatan pada anak usia dasar
- b) Penyediaan buku rapor Kesehatan ku

6. Pelayana Kesehatan Pada Usia Lanjut

Permasalahan pada pelayanan usia lanjut adalah:

- Pengadaan logistic berupa strip untuk skrining Lansia sebagai penunjang indicator program lansia tidak ada
- Sering terjadi penggantian tanggungjawab program lansia di Puskesmas sehingga pemahaman tentang indicator program lansia tidak maksimal

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- Menambah anggaran untuk pembelian logistic untuk penunjang program lansia diantaranya strip gula darah, strip kolesterol dan buku Kesehatan lansia

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Permasalahan :

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produkti hun 2022 sebesar 100% Capaian ini sudah mencapai target namun dalam monitoring dan evaluasi dilapangan didapatkan beberapa kendala yang menjadi permasalahan seperti :

- Kegiatan skrining Deteksi Dini yang belum optimal (Usia Produktif, DM, Hipertensi)
- Puskesmas lebih fokus pada pelaksanaan vaksin covid (2021)
- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kurangnya dukungan wali nagari / Pemerintahan di Kecamatan terhadap program penyakit tidak menular dan kegiatan deteksi dini.
- Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas (hanya 30% dari sasaran
- Belum terlaksananya kegiatan Posbindu secara kontiniu dan belum terbentuknya Kader Posbindu PTM di Kecamatan
- Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal kedalam sistim Aplikasi karena keterbatasan tenaga dan sarana / laptop/ PC di Puskesmas.

Solusi :

- Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dari program lain misalnya kegiatan vaksinasi
- Melakukan skrining mobile di setiap instansi pemerintah,tempat ibadah dan tempat umum
- Pembentukan kader Posbindu PTM di Kecamatan
- Penambahan BMHP sesuai sasaran dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2022 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut sudah memuaskan dan sesuai dengan target, tapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatansehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak

- melakukan pengobatan secara rutin
- Pengadaan alat media infografis seperti leaflet , banner tidak ada / keterbatasan dana untuk pembuatan media infografis
- Keterbatasan alat / Posbindu kit dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti alat pengukur tensi yang sudah banyak rusak karena pemakaian

Solusi :

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, untuk melakukan skrining di tempat masing masing
 - Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis Peningkatan kapasitas pengelola / nakes di Puskesmas secara berkala.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus tahun 2022 sebesar 100%. Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga capaian ini dapat mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian upaya peningkatan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus tetap harus ditingkatkan.

Solusi :

- Peningkatan pelayanan dan peningkatan kapasitas pengelola / nakes
- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2022 sebesar 100 %. Capaian tersebut sudah sesuai target dari dalam pelaksanaannya berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ditemukan beberapa kendala seperti :

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik

Solusi :

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit
- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan TB di masyarakat
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada gejala

3. Kurangnya dukungan dari lintas sector di kecamatan/wali nigari terhadap Program TB
4. Belum terbentuknya kader dan tidak adanya alokasi anggaran bagi kader yang melakukan pelacakan/temuan kasus TB
5. Belum optimalnya anggaran untuk alokasi kegiatan Program TB, contohnya : Pembentukan KOPI TB
6. Masih adanya anggapan yang salah dari masyarakat/stigma negative untuk penyakit TB

Strategi pemecahan masalah (Solusi) :

1. Peningkatan scrining
 2. Penguatan forum organisasi profesi Kesehatan
 3. Peningkatan sosialisasi, edukasi, promosi
 4. Penguatan komitmen pemerintah daerah termasuk dalam penganggaran
 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat/kader
12. Pelayanan Kesejatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
- Faktor-Faktor yang menjadi kendala pencapaian HIV di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
- a. Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan pada kelompok resiko HIV (LSL, Waria, Penasum)
 - b. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala
 - c. Belum terlaksananya integrasi dengan lintas sector secara optimal
 - d. Belum terbentuknya kader yang ikut dalam pelacakan kasus HIV
 - e. Anggaran yang kurang memadai dalam pelaksanaan operasional Program HIV

Strategi dalam pemecahan masalah pencapaian SPM (solusi) yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan screening pada kelompok resiko terinfeksi HIV
2. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan pemberdayaan masyarakat untuk screening HIV
3. Meningkatkan sosialisasi/edukasi/promosi (penyuluhan dan pengadaan media KIE)
4. Pelatihan konselor bagi petugas puskesmas dan pengusulan penambahan puskesmas PDP

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Realisasi Target Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sumber Anggaran
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	874.394.097	607.426.350	69	APBD
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	519.486.334	210.272.850	40	APBD
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	23.450.000	16.563.900	71	APBD
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	362.909.016	247.633.700	68	APBD
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	465.326.070	366.071.350	79	APBD
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	523.058.702	325.552.500	62	APBD
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	332.335.420	74.201.800	22	APBD
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	49.395.000	41.735.600	84	APBD
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	50.000.000	43.695.550	87	APBD
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	321.223.280	176.257.699	55	APBD
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	38.400.000	37.908.450	99	APBD
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/kota	20.991.500	18.428.200	88	APBD

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, perhitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu syarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

B. Saran

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan urusan wajib daerah di Bidang Kesehatan.